

## DAMPAK PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

Okta Amaliya<sup>1</sup> Adolfo Sanjaya<sup>2</sup> Madufi Firnando<sup>3</sup>

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131

Email: [oktaamaliya@gmail.com](mailto:oktaamaliya@gmail.com), [adlfsan27@gmail.com](mailto:adlfsan27@gmail.com), [madupifrnando@gmail.com](mailto:madupifrnando@gmail.com)

### Abstrak

Dalam sistem desentralisasi di Indonesia, otonomi daerah merupakan strategi kebijakan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber dayanya, merumuskan kebijakan, dan melaksanakan program pembangunan sesuai karakteristik lokal. Studi ini menganalisis pengaruh implementasi otonomi daerah tentang perluasan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sampai dengan tahun 202, yang merupakan periode pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini memanfaatkan data utama dari publikasi BPS serta literatur ilmiah terkait tata kelola publik dan desentralisasi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 3,32% pada 2021 menjadi 5,31% pada 2022, diikuti stabilitas sekitar 5,07% pada 2023, dan penurunan ke 4,95% pada 2024. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan otonomi daerah mampu mendukung pemulihan ekonomi, meskipun terdapat tantangan berupa kapasitas fiskal, kualitas sumber daya manusia aparatur, dan efektivitas tata kelola. Secara keseluruhan, otonomi daerah terbukti berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, namun keberlanjutan keberhasilannya membutuhkan peningkatan kapasitas kelembagaan, integrasi kebijakan, dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi

### Abstrak

Regional autonomy is a strategic policy within Indonesia's decentralization system that provides local governments with the flexibility to manage resources, formulate policies, and implement development programs according to local characteristics. This paper examines how the establishment of regional autonomy affected Central Java Province's economic growth during the post-COVID-19 economic recovery phase, from 2021 to 2024. The study employs a descriptive qualitative methodology and makes use of primary data from BPS publications as well as scientific literature on fiscal decentralization and public governance. The results show an increase in economic growth from 3.32% in 2021 to 5.31% in 2022, followed by stability at around 5.07% in 2023, and a decline to 4.95% in 2024. These findings demonstrate that regional autonomy policies are capable of supporting economic recovery, despite challenges such as fiscal capacity, the quality of human resources, and effective governance. Overall, regional autonomy has proven instrumental in

### Article history

Received: November 2025  
Reviewed: November 2025  
Published: November 2025

Plagirism checker no 1265  
Doi : prefix doi :  
10.8734/musytari.v1i2.359  
Copyright : author  
Publish by : musytari



This work is licensed under  
a [creative commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)  
[attribution-noncommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)  
4.0 international license

supporting Central Java's economic growth, but its sustainable success requires increased institutional capacity, policy integration, and cooperation between the national and local administrations.

Keywords: Regional Autonomy, and Economic Growth

## Pendahuluan

Otonomi daerah menjadi pilar penting dalam reformasi pemerintahan Indonesia sejak diberlakukannya UU No 22 1999 hingga UU 23 2014. Kebijakan ini bertujuan memperkuat efektivitas pemerintahan daerah melalui pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan administrasi publik, anggaran, dan pembangunan ekonomi. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dipandang sebagai upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah, mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, dan mempercepat pembangunan wilayah melalui pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah (Rodríguez-Pose and Gill 2005). Dalam konteks ekonomi, desentralisasi diyakini mampu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, responsivitas kebijakan, dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Desentralisasi fiskal merupakan pilar utama dalam kebijakan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan mengelola keuangan publik untuk menjawab kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat setempat (Faguet 2004). Dalam konteks Jawa Tengah, implementasi otonomi daerah memainkan peran signifikan mengingat provinsi ini merupakan salah satu pusat ekonomi nasional dengan beban pembangunan yang besar, terutama setelah pandemi COVID-19.

Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu lokasi penting di Jawa, memegang peran penting dalam menopang ekonomi nasional. Hal ini ditunjukkan oleh struktur ekonomi regional yang didominasi sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian sebagai penopang utama ekonomi Jawa-Bali (Tengah 2022). Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sempat terkontraksi akibat pandemi COVID-19, mengikuti tren nasional dan global, sebelum kemudian menunjukkan tren pemulihan ekonomi secara bertahap pada 2021-2022 (BPS Jateng 2023). Kondisi ini mencerminkan kerentanan ekonomi daerah terhadap guncangan krisis global dan kebutuhan penting untuk adaptasi kebijakan daerah yang responsif dan berbasis pada desentralisasi fiskal. Kinerja ini menimbulkan pertanyaan akademik mengenai sejauh mana otonomi daerah berperan dalam pemulihan ekonomi daerah pascapandemi, mengingat literatur menggarisbawahi bahwa devolusi kewenangan mampu mempercepat respons kebijakan ekonomi lokal dan meningkatkan efektivitas layanan publik (Rodríguez-Pose and Gill 2005) (Ahmad and Mabrouk 2021).

Namun demikian, kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pasca pandemi menunjukkan gejolak fluktuatif, meskipun secara umum mengarah pada tren pemulihan positif, dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada 2022 sebelum akhirnya kembali melandai pada 2024. Kondisi tersebut memperlihatkan Efektivitas pemerintahan daerah sangat penting bagi terwujudnya otonomi daerah, kapasitas fiskal, serta kemampuan manajerial pemerintah dalam memanfaatkan kewenangan yang ada untuk peningkatan ekonomi (Ahmad and Mabrouk 2021) (Sutaryo and Puspitasari 2019). Temuan-temuan penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa desentralisasi tidak otomatis memicu pertumbuhan jika tidak diiringi kapasitas kelembagaan yang memadai, tata kelola yang baik, serta kemampuan daerah dalam memobilisasi sumber pendapatan lokal (Mulyadi and Kusuma 2020) (Sunardi, Syafiq, and Hernanda 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi ekonomi sangat dipengaruhi kapasitas institusi publik, tata kelola fiskal, dan kualitas sumber daya manusia di daerah (Ahmad and Mabrouk 2021) (Sutaryo and Puspitasari 2019). Berdasarkan hal itu, studi ini menjadi penting untuk memahami dampak implementasi otonomi daerah terhadap kinerja ekonomi Jawa Tengah dalam konteks pemulihan global.

Di Indonesia, “dasar legal pelaksanaan otonomi daerah tertuang dalam UUD 1945 dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembagian fungsi pemerintahan dan tanggung jawab layanan publik antara pemerintah pusat dan daerah” (Yapputro 2023). Regulasi tersebut menuntut pemerintah daerah mampu menyelaraskan visi pembangunan regional dengan kepentingan nasional melalui tata kelola yang efektif, akuntabel, serta berbasis kepentingan masyarakat setempat. Oleh karena itu, kapasitas kelembagaan, kualitas birokrasi, dan komitmen politik lokal dalam melaksanakan amanat pembangunan semuanya berperan dalam pencapaian otonomi daerah di samping kerangka legislatif.

## Metodelogi penelitian

Untuk memahami secara mendalam fenomena pelaksanaan otonomi daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, konteks, dan dinamika kebijakan daerah secara komprehensif berdasarkan fakta empiris dan interpretasi ilmiah (Neergaard et al. 2009). Studi deskriptif kualitatif juga tepat untuk memberikan gambaran fenomena sosial dan pemerintahan secara natural tanpa manipulasi variabel, khususnya dalam konteks studi kebijakan publik daerah (Hem and Liebenberg 2024).

Data penelitian ini menggunakan data primer dokumen berupa publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah periode 2021-2024, termasuk indikator pertumbuhan ekonomi, struktur PDRB, belanja pemerintah daerah, pendapatan asli daerah (PAD), kemiskinan, dan ketenagakerjaan. Penggunaan dokumen resmi pemerintah bertujuan untuk menjamin kredibilitas

dan validitas data ekonomi makro regional yang dianalisis (BPS JATENG 2021) (Tengah 2022) (BPS Jateng 2023)( BPS JATENG 2024). Selain itu, studi ini juga menggunakan literatur akademik yang relevan sebagai data sekunder untuk memperkuat interpretasi hasil penelitian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berbasis data statistik memungkinkan pengujian empiris hubungan sebab-akibat antarvariabel, terutama dalam kajian kebijakan desentralisasi fiskal yang menuntut pengukuran kinerja pembangunan daerah secara akuntabel dan berbasis bukti. Pemahaman teoretis penelitian ini berlandaskan konsep bahwa otonomi daerah memfasilitasi pemberdayaan kewenangan lokal, efisiensi tata kelola, dan peningkatan kemandirian fiskal daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sebagaimana diuraikan oleh (Sinaga and Damayanti 2025) (Supriatna 2022) dalam kajian desentralisasi modern. Penelitian ini juga memperhatikan aspek responsivitas kebijakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui documentary research, yaitu analisis sistematis terhadap laporan statistik, publikasi pemerintah, serta artikel ilmiah dan kebijakan terkait desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Proses ini dilakukan dengan mengikuti tahapan pencarian data, reduksi data, kategorisasi tema, dan interpretasi untuk mendapatkan pemahaman mendalam atas fenomena yang diteliti (Bowen 2009). Pendekatan ini sesuai

dengan tradisi penelitian kebijakan publik yang menekankan pada triangulasi sumber data dan interpretasi kontekstual.

Analisis data menggunakan teknik content analysis yang dikombinasikan dengan triangulasi literatur untuk memperkuat validitas temuan. Peneliti mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara implementasi otonomi daerah dan indikator pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi studi metodologi kualitatif yang menyatakan bahwa triangulasi dokumen dan literatur meningkatkan keandalan penelitian dan objektivitas analisis (Flick 2018). Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk naratif interpretatif untuk menjelaskan dinamika kebijakan dan ekonomi daerah pada era pascapandemi COVID-19.

## Hasil dan pembahasan

### 4.1. Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

| Tahun | Pertumbuhan ekonomi<br>( tahun ke tahun/YoY) | Catatan/ Sumber                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021  | 3,32%                                        | Data tahunan 2021: ekonomi Jawa Tengah tumbuh positif setelah kontraksi sebelumnya.                |
| 2022  | 5,31%                                        | Pertumbuhan meningkat signifikan dibanding 2021.                                                   |
| 2023  | 5,07%                                        | Angka tahunan penuh belum spesifik dalam rilis yang saya temukan; Triwulan III menunjukkan 5,07 %. |
| 2024  | 4,95%                                        | Pertumbuhan sedikit menurun dari 2022 namun tetap positif.                                         |

Hasil menunjukkan pertumbuhan melonjak di tahun 2022 pascapandemi sebelum kembali stabil. Hal ini sejalan dengan literatur bahwa pemulihan ekonomi regional bergantung pada sistem fiskal daerah dan kapasitas pemerintah lokal mengadopsi kebijakan penyeimbang (Putra and Marlina 2021) (Sinaga and Damayanti 2025). Penurunan pertumbuhan di tahun 2024 menunjukkan bahwa stabilitas institusi lokal dan keberlanjutan fiskal masih menjadi tantangan (A. Kasidi and Fitri 2024). Pasca pandemi COVID-19, perkembangan ekonomi Jawa Tengah dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan pola pemulihan, dengan tren peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 yang kemudian diikuti oleh fase stabilisasi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah meningkat dari 3,32% pada tahun 2021 menjadi 5,31% pada tahun 2022, menunjukkan proses pemulihan ekonomi yang kuat pascapandemi. Pertumbuhan ekonomi kemudian bertahan di kisaran 5,07% pada tahun 2023 sebelum sedikit menurun menjadi 4,95% pada tahun 2024 (BPS JATENG 2021) (BPS JATENG 2022) (Pusat 2023) (BPS JATENG 2024).. Tren ini memperlihatkan bahwa kebijakan daerah berperan dalam memulihkan perekonomian, namun tekanan eksternal dan kapasitas internal menjadi faktor yang memengaruhi dinamika pertumbuhan pasca stabilisasi.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2022 dapat dikaitkan dengan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah, terutama dalam aspek otonomi fiskal dan desentralisasi administratif. Menurut teori desentralisasi, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan daerah ketika kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada mereka. (Gill dan Rodriguez-Pose, 2005). Penelitian sebelumnya juga menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi fiskal yang baik meningkatkan kemampuan daerah dalam memobilisasi pendapatan daerah, meningkatkan investasi, dan memperluas pelayanan publik yang mendukung berkembangnya ekonomi regional (Ahmad and Mabrouk 2021) (Mulyadi and Kusuma 2020).

Meskipun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap Dana Transfer Pemerintah Pusat masih tinggi di Jawa Tengah, yang menandakan bahwa kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya mandiri. Ketergantungan fiskal tersebut dapat menimbulkan disparitas kinerja ekonomi antar-daerah karena kapasitas fiskal lokal menentukan tingkat pelayanan publik serta pembangunan daerah (Sun and Wang 2022). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan “otonomi tidak akan memberikan hasil signifikan jika kapasitas fiskal dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah” (Sutaryo and Puspitasari 2019)(D. Kasidi and Fitri 2024).

Keberhasilan tata kelola otonomi daerah juga sangat ditentukan oleh kompetensi aparatur pemerintah daerah serta kualitas sumber daya manusia lokal. Peran SDM menjadi katalis dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi daerah yang adaptif dan responsif terhadap kondisi lapangan. Penelitian lain menegaskan bahwa daerah dengan kualitas institusi dan aparatur pemerintahan yang tinggi cenderung mampu menciptakan tata kelola publik yang efektif dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas (Faguet 2004) (Sunardi et al. 2024). Di Jawa Tengah, peningkatan kapasitas SDM dan inovasi tata kelola digital menjadi faktor pendorong dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi, terutama pada sektor UMKM dan ekonomi berbasis komunitas.

Investasi lokal dan kolaborasi antarwilayah juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama periode penelitian. Pertumbuhan yang relatif kuat setelah pandemi menunjukkan adanya respons kebijakan untuk mendorong investasi daerah dan menguatkan sektor industri unggulan. Literature menunjukkan bahwa otonomi daerah dapat meningkatkan iklim investasi jika pemerintah daerah mampu menciptakan stabilitas regulasi, efisiensi birokrasi, dan kemudahan perizinan (Putra and Marlina 2021) (Wijaya and Rahmawati 2022). Peningkatan investasi ini menjadi salah satu penggerak utama akselerasi pemulihan ekonomi regional di Jawa Tengah pascapandemi.

Walaupun demikian, penguatan tata kelola publik, transparansi fiskal, dan mekanisme pengawasan tetap menjadi prioritas utama untuk menjaga efektivitas otonomi daerah. Kajian empiris menyebutkan bahwa korupsi dan rendahnya kualitas kontrol anggaran dapat menghambat implementasi otonomi yang efektif (Sunardi et al. 2024) (Radjak, Ratnawati, and Rohman 2025). Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas audit internal, transparansi anggaran, dan keterlibatan masyarakat merupakan komponen kunci dalam mencegah keberhasilan otonomi daerah.

## Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, pembangunan ekonomi Jawa Tengah pada periode 2021 hingga 2024 diuntungkan dengan adanya otonomi daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada 2022 menunjukkan efektivitas kebijakan fiskal daerah dan pemanfaatan otonomi dalam memulihkan ekonomi pascapandemi. Namun, adanya perlambatan di 2024 menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan PAD, sert reformasi tata kelola dan inovasi kebijakan ekonomi daerah. Untuk keberlanjutan pertumbuhan jangka panjang, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas SDM, tata kelola keuangan, serta kolaborasi antar wilayah.

## Referensi

- Ahmad, Ehtisham, and Mohammed Mabrouk. 2021. "Decentralization and Economic Growth: The Case of Indonesia's Regional Autonomy." *Journal of Regional Studies* 41(1):45-60. doi:10.1080/00343404.2021.1915862.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2021. "Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2021."
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2022. "Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2022."
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2024. "Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2024."
- Bowen, Glenn A. 2009. "Document Analysis as a Qualitative Research Method." *Qualitative Research Journal* 9(2):27-40. doi:10.3316/QRJ0902027.
- BPS Jateng. 2023. "Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2023." *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah* 1006.
- Faguet, Jean-Paul. 2004. "Does Decentralization Increase Government Responsiveness to Local Needs? Evidence from Bolivia." *Journal of Public Economics* 88(3-4):867-93. doi:10.1016/S0047-2727(02)00189-X.
- Flick, Uwe. 2018. *An Introduction to Qualitative Research*. 6th ed. SAGE Publications.
- Hem, Ronel, and Jannie Liebenberg. 2024. "Qualitative Description: A Practical Approach for Research in Social Sciences." *International Journal of Qualitative Methods* 23:1-10. doi:10.1177/16094069241242264.
- Kasidi, A., and N. Fitri. 2024. "Fiscal Independence and Regional Disparities in Indonesia." *Journal of Fiscal Policy*.
- Kasidi, Darwin, and Husnul Fitri. 2024. "Spatial Analysis of Regency City Minimum Wage, Labor Force, Regional Original Income and Investment Affecting Gross Regional Domestic Product in Central Java Province in 2022." *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 10(4):358. doi:10.29210/020244689.
- Mulyadi, Eko, and Joko Kusuma. 2020. "Pengaruh Otonomi Fiskal Dan Investasi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi & Pembangunan* 28(2):85-98.
- Neergaard, Mette A., Frede Olesen, Rikke S. Andersen, and Jens Sondergaard. 2009. "Qualitative Description-the Poor Cousin of Health Research?" *BMC Medical Research Methodology* 9(1):52. doi:10.1186/1471-2288-9-52.
- Putra, Dedi, and Rina Marlina. 2021. "Fiskal Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Era Desentralisasi: Analisis Provinsi Indonesia." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 14(2):103-18. doi:10.20885/jekt.vol14.iss2.art4.
- Radjak, Darwin Abd, Susi Ratnawati, and Abd. Rohman. 2025. "Analysis of The Formation of Autonomous Regions to Improve Local Government Efficiency in Public Services." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND EDUCATION RESEARCH STUDIES* 05(08). doi:10.55677/ijssers/v05i08y2025-01.
- Rodríguez-Pose, Andrés, and Nick Gill. 2005. "On the 'Economic Dividend' of Devolution." *Regional Studies* 39(4):405-20. doi:10.1080/00343400500159341.

- Sinaga, Fredrico Markus Rotua, and Ratih Damayanti. 2025. "Implementation of Regional Autonomy Law in Line with Local Culture." *Jurnal Hukum Indonesia* 4(2):95-102. doi:10.58344/jhi.v4i2.1685.
- Sun, Xia, and Yuan Wang. 2022. "Fiscal Decentralization and Regional Economic Growth: Evidence from China." *Economic Modelling* 110:105-15. doi:10.1016/j.econmod.2022.105828.
- Sunardi, Sunardi, Ahmad Nur Syafiq, and Trias Hernanda. 2024. "Implementasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* 8(2):59-71. doi:10.32534/djmc.v8i2.6810.
- Supriatna, Tjahya. 2022. "Perspektif Otonomi Daerah Dalam Desentralisasi." *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan* 3(1):111-23. doi:10.55745/jwbp.v3i1.27.
- Sutaryo, Hadi, and Dinar Puspitasari. 2019. "Desentralisasi Fiskal, Kualitas Institusi Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Studi Panel Provinsi Di Indonesia." *Jurnal Akuntabilitas & Keuangan Publik* 7(1):19-33. doi:10.20885/akuntabilitas.vol7.iss1.art2.
- Tengah, B. P. S. Provinsi Jawa. 2022. "Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah 2021." <https://jateng.bps.go.id>.
- Tengah, B. P. S. Provinsi Jawa. 2023. "Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah 2022." <https://jateng.bps.go.id>.
- Wijaya, Mulyono, and Yulia Rahmawati. 2022. "Investasi Lokal, Otonomi Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Empiris Provinsi Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 12(3):45-60.
- Yapputro, Pascal Amadeo. 2023. "Regional Autonomy in the Context of Regional Regulations." doi:10.59888/ajosh.v1i09.37.